

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengatasi dampak air pasang surut di Kecamatan Tungkal Ilir, dapat disimpulkan bahwa:

Pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam upaya menanggulangi kerusakan lingkungan akibat pasang surut air laut. Peran ini dapat dijelaskan melalui pendekatan teori peran pemerintah yang terdiri dari tiga fungsi utama, yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator.

Sebagai Motivator, pemerintah daerah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mendukung kebijakan yang telah dirancang. Hal ini dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pendekatan langsung ke masyarakat mengenai pentingnya menjaga drainase tetap bersih serta kesadaran membangun rumah yang sesuai dengan kondisi geografis, seperti rumah panggung.

Sebagai Fasilitator, pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana fisik yang mendukung pengurangan dampak pasang surut, seperti pembangunan dan penebalan jalan, pembuatan sistem drainase yang terintegrasi, serta penyediaan lahan tanggul. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda memiliki peran penting

dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan infrastruktur berbasis mitigasi bencana lingkungan.

Sebagai Dinamisor, pemerintah daerah mengoordinasikan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah lain, tokoh masyarakat, maupun pihak swasta, dalam upaya menangani banjir akibat air pasang. Kolaborasi ini meliputi perencanaan lintas sektor, pembagian kewenangan pengelolaan sungai, serta penggalangan dana dan partisipasi dalam proyek infrastruktur ramah lingkungan.

Namun, dalam pelaksanaannya, peran tersebut masih menemui berbagai kendala, antara lain: keterbatasan anggaran infrastruktur, drainase yang tidak terintegrasi, rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan, hingga tumpang tindih kewenangan antarwilayah sungai. Selain itu, perubahan pola pembangunan rumah warga dari rumah panggung menjadi rumah beton juga menyebabkan aliran air terhambat, memperparah dampak pasang surut.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah cukup optimal, namun masih memerlukan peningkatan di sisi koordinasi lintas instansi, penguatan peran masyarakat, dan kesinambungan pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi bencana lingkungan. Keberhasilan mengatasi dampak pasang surut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang berlandaskan pada kesadaran kolektif serta pengelolaan lingkungan yang adaptif dan berkelanjutan.

Jika kamu ingin saya ubah ke format Word atau PDF, tinggal beri tahu, dan akan saya siapkan langsung.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah daerah sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan melalui sinergi antarlembaga, edukasi, kebijakan yang lebih tegas, dan partisipasi aktif masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola lingkungan pesisir yang adaptif, berkelanjutan, dan tangguh terhadap perubahan iklim serta dinamika alam.

#### **4.1.2 Kendala Pemerintah Daerah dalam mengatasi dampak pasang surut**

Dalam upaya pemerintah daerah menangani dampak pasang surut air laut di Kecamatan Tungkal Ilir, terdapat sejumlah kendala yang secara langsung memengaruhi efektivitas kebijakan dan pembangunan infrastruktur. Kendala-kendala tersebut antara lain:

##### **1. Tingginya Pasang Air Laut di Awal dan Akhir Tahun**

Peningkatan volume air laut yang cukup signifikan pada periode tertentu seperti awal dan akhir tahun menyebabkan banjir genangan yang merusak infrastruktur jalan. Genangan air tersebut mempercepat kerusakan jalan aspal dan beton, menghambat proses perawatan, serta mengganggu aktivitas pembangunan.

##### **2. Sistem Drainase yang Tidak Optimal**

Banyak drainase yang dibangun di wilayah pesisir memiliki elevasi yang sejajar dengan permukaan laut, sehingga air tidak dapat mengalir keluar secara maksimal. Hal

ini menyebabkan genangan tidak cepat surut, bahkan air laut justru dapat masuk kembali ke daratan melalui saluran ini.

### 3. Sampah yang Menyumbat Saluran Drainase

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan mengakibatkan drainase kerap tersumbat oleh sampah rumah tangga. Kondisi ini memperparah banjir saat pasang karena air tidak dapat mengalir dengan lancar ke saluran pembuangan.

### 4. Perbedaan Kewenangan Pengelolaan Sungai

Beberapa sungai yang memengaruhi aliran pasang di wilayah Tanjung Jabung Barat bukan sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan sungai yang tumpang tindih antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Jambi, hingga kewenangan pemerintah pusat menyebabkan koordinasi teknis dan penganggaran menjadi tidak optimal.

### 5. Keterbatasan Anggaran Infrastruktur

Masalah klasik seperti keterbatasan anggaran seringkali menjadi penghambat utama dalam pembangunan jalan, tanggul, dan drainase. Pembangunan tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dalam waktu singkat, melainkan harus bertahap mengikuti kemampuan fiskal daerah.

### 6. Sistem Drainase yang Tidak Terkoneksi

Drainase yang dibangun di beberapa ruas jalan tidak saling terhubung antara saluran primer, sekunder, dan tersier. Akibatnya, aliran air menjadi tidak efektif dan menyebabkan air tertahan di satu titik tanpa bisa dialirkan ke titik pembuangan akhir.

#### Minimnya Kesadaran Masyarakat

Walaupun pemerintah daerah telah melakukan penyuluhan, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga infrastruktur yang dibangun. Hal ini menghambat upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.

### 7. Perubahan Bentuk Rumah Warga

Dahulu, banyak rumah di Tungkal Ilir dibangun dengan bentuk rumah panggung, yang sangat efektif dalam menghadapi pasang surut. Namun saat ini, tren pembangunan rumah permanen dengan dasar beton justru membuat air pasang sulit mengalir dan memperparah genangan.

### 4.2 Saran

1. Pemerintahan kula tungkal akan selalu mengamati dan memberikan arahan kepada masyarakat dalam menjaga dan menerapkan program yang direncanakan atau yang sudah ada , kedepannya dengan penebalan jalan, pembuatan derinase yang akan di jaga dan dirawat oleh pemerintah untukt dapat meminimalisir dari dampak air yang pasang surut bagi masyarakat.

2. Pembangunan dan fasilitas yang dibuat memang bertujuan agar masyarakat bisa memakai dan menikmatinya , pemerintah juga sudah sering memberikan edukasi dan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya merawat dan menjaga fasilitas yang sudah ada , contohnya membuang sampah pada tempatnya agar tidak menyumbat derinase yang sudah di buat.